

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu aktivitas yang dijalani oleh sebagian komunitas tertentu, serta objeknya adalah wanita (Kartini Kartono, 1988). Kegiatan ini merupakan bentuk gejala sosial yang menyimpang dari norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu, prostitusi mempunyai akibat bagi masyarakat sekitar, terutama bagi kesehatan, ekonomi, dan moral. Menurut Madjid et al., (2019), pada umumnya prostitusi dianggap sebagai profesi dalam pekerjaan sosial atau tindakan yang melakukan penyimpangan paling lama dibandingkan dengan profesi lain meskipun status yang terkandung didalamnya adalah tidak sah baik dalam norma-norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Prostitusi sebagai fenomena sosial telah lama menjadi topik yang kontroversial di banyak negara, termasuk Indonesia. Tidak heran jika prostitusi menjamur di Indonesia dan bukan lagi terdapat di kota-kota besar, tetapi juga di desa dengan latar belakang dan perkembangan yang berbeda pula. Dengan demikian, Prostitusi atau pelacuran menjadi masalah yang unik dan cukup menarik untuk dibahas karena status hukumnya belum jelas hingga saat ini.

Di tingkat nasional, pemerintah telah menerapkan berbagai regulatif dan kebijakan untuk memberantas prostitusi, salah satunya adalah penutupan lokalisasi. Menurut data Kementerian Sosial, terdapat sekitar 168 lokalisasi

prostitusi di Indonesia pada tahun 2017, dengan 118 di antaranya ditutup dalam kerangka program "Indonesia Bebas dari Lokalisasi". Penutupan ini didorong oleh kekhawatiran tentang dampak buruk lokalisasi terhadap isu-isu sosial seperti moralitas, kesehatan, keamanan, ekonomi informal, dan citra politik daerah. Kebijakan tersebut didasarkan pada upaya menciptakan lingkungan sosial yang dianggap lebih sehat dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun demikian, penutupan lokalisasi prostitusi bukanlah kebijakan yang sederhana. Kebijakan penutupan lokalisasi sering kali menimbulkan dampak sosial yang beragam (Ikayanti & Lestari, 2019). Di satu sisi, penutupan dianggap mampu mengurangi aktivitas prostitusi yang tampak secara terbuka dan memperbaiki citra wilayah. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti hilangnya sumber mata pencaharian bagi pekerja seks dan masyarakat yang menggantungkan ekonomi pada aktivitas lokalisasi, munculnya praktik prostitusi terselubung, serta perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, dampak dari penutupan lokalisasi tidak hanya menyentuh aspek moralitas, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas (Rahma et al., 2025). Dalam perspektif sosiologis, kebijakan penutupan lokalisasi dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara terhadap ruang sosial yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Kebijakan tersebut menciptakan perubahan sosial yang memengaruhi pola interaksi, struktur ekonomi lokal, hingga dinamika kekuasaan antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok yang terdampak. Hal ini penting untuk memahami

bagaimana perubahan tersebut dimaknai dan dialami oleh berbagai pihak yang berada dalam konteks sosial yang sama.

Lokalisasi Wandan merupakan salah satu lokalisasi prostitusi yang pernah beroperasi di Kabupaten Tegal yang berada di Desa Munjungagung. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, kawasan ini dikenal sebagai salah satu lokasi aktivitas prostitusi yang tidak hanya melibatkan pekerja seks dan pelanggan, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Keberadaan lokalisasi tersebut secara tidak langsung menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Desa Munjungagung. Aktivitas yang berlangsung di kawasan lokalisasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku utama prostitusi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar melalui berbagai usaha pendukung seperti warung makan, kios, jasa transportasi, rumah kost, hingga berbagai bentuk perdagangan informal lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan lokalisasi telah membentuk hubungan sosial dan ekonomi yang kompleks antara lokalisasi dan masyarakat sekitar. Namun demikian, keberadaan Lokalisasi Wandan juga menimbulkan berbagai respons dan pandangan yang berbeda di masyarakat. Sebagian pihak memandang keberadaannya sebagai sumber masalah sosial yang bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang melihat lokalisasi sebagai sumber penghidupan ekonomi yang memberikan manfaat bagi warga sekitar. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan antara aspek moralitas, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Kebijakan penutupan Lokalisasi Wandan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui keterlibatan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menjadi momentum perubahan sosial yang penting bagi masyarakat setempat. Penutupan tersebut tidak hanya mengubah fungsi ruang fisik kawasan lokalisasi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang selama ini berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Munjungagung, Dinas Sosial, Satpol PP, serta tokoh masyarakat menjadi aktor-aktor penting yang memiliki pengalaman, pandangan, dan interpretasi berbeda terhadap dampak yang muncul pasca penutupan lokalisasi. Penutupan Lokalisasi Wandan menghadirkan berbagai pertanyaan penting yang menarik untuk dikaji. Fenomena ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan publik tidak selalu menghasilkan dampak yang seragam bagi seluruh kelompok masyarakat. Dampak yang muncul sering kali bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya. Dalam memahami dampak penutupan lokalisasi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kuantitatif yang hanya mengukur perubahan secara statistik, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan makna yang dibangun oleh para aktor sosial yang terlibat. Sehubungan dengan itu, memunculkan pertanyaan kritis mengenai, apakah penutupan lokalisasi dapat menyelesaikan persoalan prostitusi atau hanya mengubah bentuk dan ruang praktiknya. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kondisi ekonomi masyarakat setelah penutupan, bagaimana efektivitas program

pemerintah dalam menangani dampak sosial yang muncul, serta bagaimana masyarakat membangun kembali kehidupan sosialnya setelah perubahan tersebut terjadi. Dalam konteks ini, persoalan-persoalan esensial yang dihadapi masyarakat, mulai dari munculnya perilaku sosial baru, efektivitas pelaksanaan program yang menjadi bagian diskursus. Oleh karena itu, untuk memahami keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

Penutupan lokalisasi prostitusi telah menjadi sorotan dalam sejumlah penelitian terdahulu yang memetakan dampak sosial dan ekonomi yang ada. Salah satunya penelitian yang dilakukan Murdiyanto (2019) yang berjudul *“Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar”*, dengan hasil temuan bahwa ditutupnya lokalisasi berdampak pada kehidupan PSK dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perubahan dalam hal matapencarian. Dampak sosial berupa kesehatan, keamanan, dan kehidupan keagamaan masyarakat di lingkungan lokalisasi. Kondisi ekonomi berdampak pada turunnya ataupun bahkan hilangnya pendapatan sebagai pelaku bisnis di lingkungan lokalisasi. Pendidikan yang rendah, membuat masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan di luar lokalisasi. Penelitian serupa dilakukan oleh Ambarwati et al., (2020) dengan judul *“Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri”*, menghasilkan temuan bahwa secara ekonomi penutupan lokalisasi berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Penutupan lokalisasi membuat pendapatan sebagian masyarakat menurun. Penurunan

pendapatan hanya dirasakan oleh orang-orang yang bergantung hidup pada lokalisasi.

Di sisi lain, penelitian oleh Dewi & Hilman (2019) dengan judul *“Relokasi Pekerja Seks Komersial Setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng”*, menemukan bahwa penutupan lokalisasi memunculkan beberapa persoalan terkait keberadaan eks PSK yang sulit dikendalikan, karena beberapa program dianggap tidak efektif. Dana kompensasi yang diberikan kepada eks PSK selain jumlahnya yang tidak sama, para pekerja tersebut merasa dana yang diberikan sangat minim, walaupun demikian proses penutupan lokalisasi sudah berhasil dilaksanakan. Demikian studi Purnama (2019) berjudul *“Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019”*, menghasilkan temuan bahwa program penutupan lokalisasi telah berjalan walaupun masih ada lokalisasi masih beroperasi dan beralih operasional kebentuk lain. Dampak kebijakan penutupan lokalisasi berdampak pada pelaku bisnis di lingkungan lokalisasi. Pemerintah untuk tegas dalam melakukan program yang telah dilakukan. Para pekerja yang terkait lokalisasi agar diberi bantuan pembekalan dan keterampilan sesuai dengan keinginan masing-masing pekerja, serta memberikan bimbingan agar tidak lagi meresahkan masyarakat akan keberadaan tempat tersebut.

Selain itu, penelitian oleh Miskawi et al., (2024) dengan judul *“Dampak Penutupan Lokalisasi Di Kabupaten Banyuwangi”*, menemukan bahwa pada dasarnya penutupan lokalisasi/resosialisasi, masyarakat terbagi menjadi dua

kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung. Sebagian besar anggota kelompok yang tidak mendukung beralasan bahwa penutupan tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanggulangan dampak yang akan muncul. Penelitian serupa dilakukan oleh Natsir (2018) dengan judul "*Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Masyarakat Sekitar Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*", dengan menghasilkan temuan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat penutupan lokalisasi sangat dirasakan oleh pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di daerah sekitar lokalisasi. Pelaku usaha mengeluhkan tingkat pendapatan yang mulai menurun, hal itu dirasakan oleh warung makanan dan minuman, tukang parkir, buruh cuci, hingga tukang ojek. Selain itu, beberapa respon masyarakat setuju menilai bahwa penutupan lokalisasi ini dapat membangun etos kerja yang lebih baik di lingkungan masyarakat sekitar lokalisasi, meminimalisir demoralisasi pada remaja dan anak-anak.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, diidentifikasi bahwa dampak penutupan lokalisasi memicu runtuhnya ekonomi lokal, karena kurangnya pelatihan keterampilan yang matang. Serta prostitusi tidak hilang, melainkan berubah bentuk menjadi terselubung yang memicu risiko kesehatan (Murdiyanto, 2019; Ambarwati et al., 2020). Di sisi lain, penutupan lokalisasi juga menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitar (Setiawan, 2023; Miskawi et al., 2024). Berbagai penelitian terdahulu diatas mengenai prostitusi dan penutupan lokalisasi pada umumnya lebih banyak berfokus pada aspek

kebijakan pemerintah, dampak ekonomi terhadap pekerja seks, dan efektivitas program rehabilitasi pasca penutupan. Sementara itu, pada penelitian “Dampak Penutupan Lokalisasi Prostitusi Wandan Di Desa Munjungagung Kabupaten Tegal” lebih terfokus pada dampak sosial dan politik yang dirasakan masyarakat sekitar akibat penutupan lokalisasi prostitusi. Fokus penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yakni cenderung melihat dampak penutupan lokalisasi secara parsial, misalnya hanya dari sudut pandang pemerintah atau kelompok tertentu. Padahal fenomena ini melibatkan berbagai aktor sosial yang memiliki kepentingan, pengalaman, dan interpretasi yang berbeda-beda. Kurangnya kajian yang menghadirkan perspektif masyarakat, tokoh masyarakat, Dinas Sosial, dan Satpol PP secara bersamaan menyebabkan pemahaman mengenai dampak penutupan lokalisasi masih belum komprehensif. Terdapat juga perbedaan lokasi dimana penelitian ini menitikberatkan pada dampak penutupan lokalisasi prostitusi di Desa Munjungagung Kabupaten Tegal. Wilayah tersebut menjadi perhatian karena prostitusi Wandan merupakan salah satu lokalisasi yang pernah beroperasi di Kabupaten Tegal dengan kurun waktu yang cukup panjang, serta lokalisasi prostitusi yang terkenal pada masanya. Selain itu, menurut data Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan jumlah terdampak paling banyak diposisi kedua yaitu 88 terdampak. Namun, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menjembatani temuan mengenai pengalaman sosial masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan kawasan lokalisasi sebelum dan sesudah

penutupan masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Lokalisasi Wandan di Desa Munjungagung Kabupaten Tegal.

Penelitian ini juga mengisi kesenjangan tersebut, serta menawarkan kebaruan dengan menggunakan kerangka dampak sosial yang digagas oleh Frank Vanclay (2003), serta kerangka dampak politik yang digagas oleh David Easton (1965). Kerangka dampak sosial ini terdiri dari empat aspek yang saling terkait; perubahan kondisi sosial ekonomi, interaksi dan kohesi sosial, persepsi dan keamanan lingkungan, serta perubahan nilai dan norma sosial. Hal ini didasarkan pada pandangan Frank Vanclay bahwa dampak sosial tidak hanya diukur melalui perubahan yang bersifat material atau ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan dalam hubungan sosial, pola interaksi, nilai budaya, kualitas hidup, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan sosialnya. Dalam pandangan ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang mengalami dan memaknai perubahan sosial yang terjadi akibat suatu kebijakan. Dengan kerangka ini, dampak penutupan lokalisasi tidak hanya dilihat dari dampak sosial dan ekonomi, tetapi digali lebih dalam bagaimana dampak penutupan Lokalisasi Wandan dipahami, dirasakan, dan dimaknai oleh berbagai pihak yang terlibat. Dalam kerangka dampak politik terdiri dari empat aspek yang saling berkaitan juga; *input* (masukan), *conversion process* (proses pengelolaan), *output* (keluaran), dan *feedback* (umpan balik). Hal ini didasarkan pada pandangan David Easton bahwa suatu mekanisme yang mengubah tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) dari masyarakat menjadi keputusan atau kebijakan yang mengikat masyarakat. Teori tersebut relevan

karena penutupan Lokalisasi Wandan merupakan suatu bentuk intervensi kebijakan yang berpotensi menghasilkan berbagai perubahan sosial di masyarakat Desa Munjungagung. Dampak tersebut dapat terlihat dari perubahan mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas lokalisasi, perubahan hubungan sosial antarwarga, perubahan persepsi masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya, serta perubahan kondisi keamanan dan ketertiban sosial pasca penutupan lokalisasi. Sementara teori dampak politik juga relevan karena kebijakan penutupan Lokalisasi Wandan dapat dipahami sebagai *output* dari sistem politik daerah. Kebijakan tersebut lahir dari berbagai tuntutan sosial, moral, agama, dan ketertiban umum yang berkembang di masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dan Satpol PP kemudian melakukan proses konversi terhadap tuntutan tersebut hingga menghasilkan kebijakan penutupan lokalisasi. Setelah kebijakan diterapkan, muncul berbagai bentuk *feedback* dari masyarakat. Sebagian masyarakat mungkin mendukung kebijakan tersebut karena dianggap mampu mengurangi praktik prostitusi dan memperbaiki kondisi sosial lingkungan.

Dalam konteks penelitian ini, teori dampak sosial Frank Vanclay akan ditempatkan untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setelah penutupan lokalisasi, seperti perubahan mata pencaharian, hubungan sosial, kondisi lingkungan sosial, rasa aman, dan kualitas hidup masyarakat. Teori ini membantu peneliti memahami bagaimana masyarakat mengalami dan memaknai perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan penutupan lokalisasi. Sementara itu, teori dampak politik David Easton untuk

menganalisis dampak politik yang muncul setelah kebijakan diterapkan, terutama terkait hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Melalui teori ini, peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan penutupan lokalisasi dipersepsikan oleh masyarakat, bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta bagaimana proses umpan balik (*feedback*) yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan Satpol PP. Dengan demikian, kedua teori tersebut membentuk kerangka analisis yang terpadu. Teori Frank Vanclay berfungsi menjelaskan perubahan sosial yang terjadi dan bagaimana perubahan itu dirasakan masyarakat, sedangkan teori David Easton menjelaskan bagaimana kebijakan penutupan lokalisasi menghasilkan respons politik dan membentuk hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pasca kebijakan. Melalui penggunaan kedua teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan politik penutupan lokalisasi Wandan serta dinamika yang berkembang di masyarakat Desa Munjungagung setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial, kebijakan publik, dan dinamika masyarakat lokal. Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial melalui pendekatan kebijakan penutupan lokalisasi, kajian mengenai pengalaman nyata masyarakat menjadi sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada tujuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena prostitusi sebagai persoalan sosial yang kompleks, konteks penutupan Lokalisasi Wanda di Desa Munjungagung, berbagai kekosongan akademik dan praktis yang muncul, serta adanya kesenjangan pengetahuan mengenai dampak yang dirasakan oleh berbagai aktor sosial, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya memahami secara mendalam bagaimana dampak penutupan Lokalisasi Wanda terhadap kehidupan masyarakat Desa Munjungagung serta bagaimana dampak tersebut dipersepsikan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan tokoh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan berbagai pengalaman, makna, serta dampak sosial dan politik yang muncul pasca penutupan lokalisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dampak sosial dan politik yang ditimbulkan dari kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi Wanda terhadap kehidupan masyarakat Desa Munjungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dampak sosial yang terjadi setelah penutupan lokalisasi Wanda terhadap masyarakat Desa Munjungagung Kabupaten Tegal.

2. Untuk menganalisis dinamika politik yang muncul akibat dari kebijakan penutupan lokalisasi Wandan.
3. Untuk menilai sejauh mana kebijakan penutupan lokalisasi berpengaruh terhadap stabilitas sosial-politik serta tatanan kehidupan masyarakat di Desa Munjungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian di bidang ilmu sosial, politik, dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu penataan sosial, moralitas publik, serta kebijakan penanganan prostitusi di tingkat lokal. Penelitian ini juga dapat memperkaya wacana akademik mengenai hubungan antara kebijakan sosial dan dinamika politik lokal dengan menyoroti bagaimana kebijakan penutupan lokalisasi bukan hanya tindakan administratif, melainkan juga proses sosial politik yang kompleks. Melalui analisis ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai bagaimana kebijakan yang didasari pertimbangan moral dan sosial dapat menimbulkan dampak yang beragam terhadap struktur masyarakat dan legitimasi pemerintah. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki manfaat yang sangat penting baik dalam pengembangan kemampuan akademik, penguatan wawasan ilmiah, maupun pembentukan kepekaan sosial dan politik terhadap realitas masyarakat di tingkat lokal. Melalui penelitian ini, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan publik, khususnya penutupan lokalisasi prostitusi. Proses penelitian memungkinkan penulis untuk melatih kemampuan analisis kritis terhadap fenomena sosial, serta memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat membawa konsekuensi yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap kebijakan penutupan lokalisasi yang telah dijalankan, sehingga dapat dijadikan landasan perbaikan kebijakan sosial selanjutnya. Pemerintah dapat memahami bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik, dan menggunakannya sebagai dasar untuk merumuskan program pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan inklusif, terutama bagi kelompok terdampak seperti mantan pekerja seks komersial (PSK) dan masyarakat sekitar.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya solidaritas

sosial, inklusivitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi pasca penutupan lokalisasi. Penelitian juga dapat mendorong pembentukan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kebijakan sosial di masa depan lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

1.5 Penelitian Terdahulu

Bagian ini menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjang penulis dalam menganalisis fenomena prostitusi. Berikut adalah beberapa studi yang menjadi rujukan:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Murdiyanto (2019) Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Menganalisis dampak penutupan lokalisasi terhadap kehidupan Pekerja Seks Komersial (PSK) serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di sekitarnya.	Penutupan memicu runtuhnya ekonomi lokal, dana kompensasi dari pemerintah habis untuk kebutuhan konsumtif karena kurangnya pelatihan keterampilan yang matang, dan prostitusi tidak hilang, melainkan berubah bentuk menjadi terselubung yang memicu risiko kesehatan.

2.	Ambarwati et al. (2020) Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri.	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Menganalisis dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat pasca kebijakan penutupan lokalisasi, serta strategi adaptasi yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.	Penutupan lokalisasi menyebabkan penurunan pendapatan yang sangat drastis, warga melakukan adaptasi dengan beralih profesi. Selain itu penutupan ini membawa dampak sosial positif berupa ketenangan batin karena pekerjaan saat ini dinilai halal dan lingkungan aman bagi perkembangan anak-anak.
3.	Dewi & Hilman (2019) Relokasi Pekerja Seks Komersial Setelah Penutupan Lokalisasi Kedung Banteng	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Menganalisis pelaksanaan kebijakan penutupan lokalisasi mengenai dampak sosiologis yang dialami oleh masyarakat dan eks PSK setelah kebijakan diterapkan.	Penutupan berhasil dilaksanakan secara resmi melalui 5 tahap utama, tetapi pasca penutupan program pelatihan keterampilan dinilai tidak efektif karena eks PSK kesulitan memasarkan produk dan hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akibatnya muncul prostitusi terselubung baru.
4.	Purnama (2019) Implementasi Kebijakan	Penelitian Kualitatif	Mengevaluasi proses birokrasi penutupan lokalisasi,	Penutupan berhasil dilaksanakan secara resmi, namun prostitusi belum sepenuhnya hilang.

	Penutupan Lokalisasi Indonesia Bebas Prostitusi 2019.		pelaksanaan program pemulangan eks WTS, pemberian bantuan modal usaha, serta mengkaji dampak langsung penutupan tersebut terhadap para pekerja yang terlibat.	Penutupan lokalisasi memicu penurunan pendapatan yang drastis bagi ekosistem pekerja informal di sekitarnya. Kendala modal dan keberlanjutan usaha eks WTS yang sulit berkembang dan banyak gulung tikar.
5.	Miskawi et al. (2024) Dampak Penutupan Lokalisasi Di Kabupaten Banyuwangi.	Penelitian Kualitatif Studi Kasus	Menganalisis dampak sosial-ekonomi (<i>multiplier effect</i>) & adaptasi bertahan hidup.	Masyarakat sekitar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung penutupan dan kelompok yang tidak mendukung. Lokalisasi memengaruhi pola hubungan sosial, di mana masyarakat sekitar cenderung kurang terbuka. Serta secara instan memukul roda perekonomian warga yang menggantungkan hidupnya.
6.	Natsir (2018) Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Masyarakat Sekitar	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Menganalisis dampak sosial-ekonomi yang menitikberatkan pada mata pencaharian warga, alih fungsi wisma menjadi	Penutupan lokalisasi menyebabkan para pelaku usaha lokal kehilangan mata pencaharian dan penurunan pendapatan secara drastis. Pemerintah

	Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.		ukm, dan perubahan perilaku harian masyarakat.	membeli wisma-wisma untuk dialihfungsikan menjadi sentra UKM. Pasca penutupan, lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat karena adanya kerja bakti dan sosialisasi HIV/AIDS. Serta kultur masyarakat berubah menjadi lebih religius.
7.	Ikayanti & Lestari (2019) Penutupan Lokalisasi Prostitusi Dorokandang: Antara Pertimbangan Moral, Sosial Dan Kebutuhan Ekonomi.	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Mengkaji latar belakang dan faktor pendorong mengapa pemerintah desa memutuskan untuk menutup lokalisasi.	Keberadaan lokalisasi dinilai bertentangan dengan norma masyarakat dan agama, serta adanya desakan dan tuntutan kuat dari masyarakat yang kontra. Pemerintah memberikan solusi pelatihan keterampilan dan modal usaha pasca penutupan.
8.	Setiawan (2023) Dampak Penutupan Lokalisasi Puger Kulon Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	Penelitian Kualitatif	Menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat pasca penutupan lokalisasi oleh pemerintah daerah, serta menganalisis pandangan pro-	Penutupan lokalisasi menjadikan lingkungan desa menjadi lebih damai, tenteram, dan bebas dari kebisingan suara musik malam. Namun, memicu penurunan pendapatan yang

	Puger Kabupaten Jember.		kontra masyarakat dan perubahan penghidupan	drastis bagi warga dan pelaku usaha lokal. Pemerintah dinilai gagal dan tidak solutif karena pemberian uang kompensasi dan pelatihan tidak mampu menopang perekonomian.
--	-------------------------	--	---	---

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Dampak Kebijakan

Dampak merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku (JE. Hosio, 2007:57). Menurut Dye dalam Kismartini (2005), dampak keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh sesuatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Sedangkan menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1996), dampak adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

Menurut Winarno (2007) mengemukakan bahwa dampak kebijakan adalah suatu konsekuensi dan akibat atau hubungan yang sebenarnya dapat terjadi di suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan sebelumnya.

Sedangkan Wahab (2012) menyatakan bahwa hasil akhir kebijaksanaan adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Terkait dengan konteks penelitian ini maka dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dampak tersebut dapat berupa perubahan yang direncanakan maupun tidak direncanakan, serta dapat bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga pada berbagai konsekuensi yang muncul dalam kehidupan masyarakat setelah kebijakan dilaksanakan. Melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan menganalisis keadaan sebelum dan sesudah terjadi penutupan lokalisasi Wanda. Analisis dampak pada penelitian ini memiliki perbedaan kondisi yang diharapkan sebelum dan sesudah adanya penutupan lokalisasi tersebut. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994: 74-75), menyatakan

ada empat jenis evaluasi dampak berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Evaluasi *single program after-only*, dimana dalam hal ini evaluasi langsung pembuatan penilaian terhadap tindakan kebijakan (program).
2. Evaluasi *single program before-after*, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan dari evaluasi single program after-only.
3. Evaluasi *comparative after-only*, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan evaluasi yang kedua tapi tidak yang pertama.
4. Evaluasi *comparative before-after*, dimana evaluasi ini disusun untuk melakukan evaluasi dari dampak kebijakan.

Dari jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz maka dapat dilihat bahwa jenis evaluasi *single program after only* merupakan jenis studi evaluasi yang paling lemah. Pemilihan terhadap jenis studi yang dipakai oleh evaluator dalam melakukan analisis seringkali sangat ditentukan oleh ketersediaan data mengenai kebijakan publik tersebut. Bila evaluator hanya dapat memperoleh data tentang sasaran program pada waktu program telah selesai, maka hanya akan melakukan studi *single program after only*. Sebaliknya, bila mempunyai data lebih lengkap tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung, maka cenderung untuk melakukan studi *single program before after* dalam mengevaluasi kebijakan.

Penelitian dampak penutupan lokalisasi prostitusi Wandan di Desa Munjungagung menggunakan jenis evaluasi *single program before-after*. Penelitian jenis *single program before-after* ini pada dasarnya meneliti dampak yang timbul pada kelompok sasaran pada saat pelaksanaan kebijakan maupun setelah kebijakan dilaksanakan, juga mengamati keadaan kelompok sasaran sebelum program kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal ini untuk melihat apakah ada perubahan keadaan kelompok sasaran setelah dilaksanakan kebijakan relokasi tersebut. Jadi jenis studi evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *single program before-after* dengan melihat keadaan kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

1.6.2 Teori Dampak Sosial

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Kemudian arti sosial itu sendiri adalah merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Sedangkan dampak sosial adalah pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat

positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan sosial.

Dampak sosial merupakan perubahan yang dialami masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya suatu intervensi, kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan. Vanclay (2003) mendefinisikan dampak sosial sebagai segala bentuk perubahan yang memengaruhi individu, kelompok, dan komunitas sebagai akibat dari intervensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini menegaskan bahwa dampak sosial tidak hanya mencakup perubahan yang terlihat secara fisik, tetapi juga mencakup perubahan pada struktur sosial, perilaku, jaringan hubungan, serta kondisi psikososial masyarakat.

Dalam konteks penutupan lokalisasi prostitusi, dampak sosial dipahami sebagai berbagai perubahan dalam pola kehidupan masyarakat sekitar baik bagi mantan pekerja, pengelola, maupun penduduk desa yang muncul sebagai konsekuensi dari hilangnya aktivitas lokalisasi sebagai suatu sistem sosial. Dampak tersebut meliputi aspek interaksi sosial, stabilitas lingkungan, keamanan, mata pencaharian, serta kondisi psikologis masyarakat. Konsep dampak sosial pada penelitian ini merujuk pada pendekatan *Social Impact Assessment (SIA)* yang dikembangkan oleh Vanclay (2003; 2020) dan Burdge (1998), yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang akan bereaksi terhadap perubahan, dan setiap kebijakan dapat menghasilkan konsekuensi tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga relasional, psikologis, dan kultural.

Vanclay (2003) mengklasifikasikan dampak sosial menjadi beberapa aspek yaitu:

1. Perubahan kondisi sosial ekonomi

Menggambarkan perubahan pada taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

2. Interaksi dan kohesi sosial

Menilai sejauh mana kebijakan atau perubahan sosial memengaruhi hubungan antaranggota masyarakat, rasa solidaritas, dan kestabilan struktur sosial.

3. Persepsi dan keamanan lingkungan

Mengukur bagaimana kebijakan mempengaruhi rasa aman individu, kepercayaan diri, dan peluang untuk memperbaiki masa depan.

4. Perubahan nilai dan norma sosial

Menggambarkan perubahan dalam cara hidup, budaya dan nilai komunitas, serta sistem keyakinan dan norma sosial.

Penilaian dampak sosial mencakup proses analisis, pemantauan, dan pengelolaan konsekuensi sosial yang diinginkan maupun tidak diinginkan, baik positif maupun negatif dari intervensi yang direncanakan (kebijakan, program, rencana, proyek), dan setiap proses perubahan sosial yang ditimbulkan oleh intervensi tersebut. Dengan tujuan utama untuk mewujudkan lingkungan biofisik dan manusia yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Peneliti menggunakan teori dampak sosial Vanclay untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan memahami

kompleksitas perubahan akibat kebijakan penutupan. Peneliti menggunakan konsep dasar dampak sosial kebijakan sebagai indikator dalam mengetahui perubahan sosial dalam masyarakat Desa Munjungagung. Teori ini juga untuk memposisikan pengalaman masyarakat sebagai pusat analisis yang penting dalam mempengaruhi sikap, reaksi, dan bentuk penyesuaian sosial. Hal ini mendorong peneliti untuk melihat dampak sebagai proses yang berkelanjutan.

1.6.3 Teori Dampak Politik

Dampak secara etimologis dari bahasa Belanda dampak atau *impak* (benturan kuat) yang diadaptasi ke bahasa Indonesia untuk menyiratkan pengaruh atau akibat signifikan dari suatu peristiwa atau tindakan. Sementara itu, politik berasal dari bahasa Yunani kuno, polis yang artinya kota atau negara kota (*city-state*). Politik dipahami sebagai proses interaksi antarindividu untuk mencapai kebaikan bersama dalam suatu komunitas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah ilmu tentang ketatanegaraan atau segala hal yang berkaitan dengan sistem dan dasar pemerintahan. Serta semua masalah dan tindakan yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain dan bagaimana bersikap dalam menangani atau menghadapi suatu masalah.

Dampak politik merupakan salah satu konsekuensi penting dari implementasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan berbagai teori menjelaskan bahwa setiap keputusan pemerintah, baik berupa tindakan

maupun ketidaktindakan selalu menimbulkan perubahan pada struktur kekuasaan, hubungan pemerintah masyarakat, serta persepsi terhadap legitimasi pemerintah. Konsep dampak politik pada penelitian ini merujuk pada *Political System Easton* (1965) memandang kebijakan publik sebagai *output* dari sistem politik yang dihasilkan melalui interaksi antara tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) masyarakat. Ketika kebijakan diterapkan, akan menghasilkan *outcome* yang kemudian kembali kepada sistem dalam bentuk *feedback* yang berpengaruh terhadap stabilitas politik. Mengacu pada teori tersebut, penutupan lokalisasi prostitusi Wanda dapat dipahami sebagai *output* sistem politik lokal yang lahir dari tuntutan moral, sosial, ketertiban umum, sekaligus tekanan politik dari aktor-aktor tertentu. Dampaknya kemudian memengaruhi persepsi masyarakat, tingkat dukungan terhadap pemerintah, munculnya resistensi, serta perubahan relasi antar aktor lokal. Hal ini, kebijakan penutupan lokalisasi tidak hanya mengandung dimensi administratif, tetapi juga memunculkan dinamika politik yang bersifat struktural maupun relasional.

Anderson dalam Winarno (2011) menekankan bahwa suatu kebijakan publik tidak berhenti pada tahap implementasi, melainkan harus dipahami dari bagaimana kebijakan itu memengaruhi para aktor politik yang terlibat. Dampak politik akan muncul ketika kebijakan menghasilkan perubahan dalam pola distribusi kekuasaan, konflik kepentingan, maupun perubahan persepsi terhadap pemerintah. Dye dalam Wahab (2013) juga menyebutkan bahwa kebijakan publik dapat mengubah struktur dan proses

politik, baik melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah maupun terjadinya disintegrasi politik ketika kebijakan tidak diterima oleh masyarakat.

Easton menjelaskan bahwa sistem politik dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) komponen utama, sebagai berikut:

1. *Input* (Masukan) merupakan tuntutan atau demands dan dukungan yang berasal dari masyarakat terhadap pemerintah.
2. *Conversion Process* (Proses Pengelolaan) adalah tahap di mana lembaga politik, seperti pemerintah mengolah tuntutan masyarakat menjadi keputusan atau kebijakan publik.
3. *Output* (Keluaran) merupakan hasil dari proses politik berupa kebijakan, undang-undang, atau keputusan resmi yang dijalankan pemerintah.
4. *Feedback* (Umpan Balik) yaitu reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Serta respon tersebut mempengaruhi sistem politik secara keseluruhan.

Teori dampak politik Easton digunakan peneliti untuk mengetahui klasifikasi dampak politik penutupan lokalisasi. Hal ini berkaitan karena dengan mengetahui dampak politik yang terjadi dan mengidentifikasi faktor penyebab penutupan. Peneliti menggunakan teori dampak politik untuk mengetahui bagaimana dampak tersebut kembali mempengaruhi struktur politik lokal. Selain itu, dapat menggali bagaimana perubahan-perubahan tersebut muncul sebagai dampak politik kebijakan. Teori tersebut juga

digunakan untuk menganalisis proses kebijakan yang tidak hanya melihat sebagai peristiwa satu arah, tetapi sebagai bagian dari sistem politik yang hidup dan terus berubah.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan salah satu langkah yang ditempuh penulis untuk menuangkan variabel ke dalam sebuah konsep sehingga dapat mengetahui indikator apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Penulis menggunakan konsep teori dampak sosial dari Vanclay (2003) untuk menjabarkan tentang perubahan yang dialami masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya suatu intervensi sosial, ekonomi, lingkungan, perilaku, jaringan hubungan, dan psikososial masyarakat yang terjadi setelah dilakukan penutupan lokalisasi prostitusi Wandan. Penulis juga akan menggunakan konsep teori dampak politik dari Easton (1965) untuk menganalisis perubahan yang mempengaruhi persepsi masyarakat, tingkat dukungan terhadap pemerintah, resistensi dan relasi antar aktor lokal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dinamika politik setelah proses penutupan lokalisasi Wandan dari hasil kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Tegal. Penulis memaparkan operasionalisasi konsep dengan tujuan untuk memudahkan analisis terhadap variabel yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini terdapat dua konsep penelitian yang harus dioperasionalkan, meliputi:

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Indikator	
Dampak Sosial	a. Perubahan struktur sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran hubungan sosial antarwarga - Solidaritas sosial - Integrasi sosial pasca penutupan
	b. Kondisi ekonomi masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> - Penurunan atau peningkatan pendapatan warga sekitar - Perubahan mata pencaharian - Kesempatan kerja baru
	c. Dampak terhadap ketenteraman dan ketertiban sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan aktivitas aparat keamanan di bekas lokalisasi - Perilaku sosial baru - Persepsi warga tentang keamanan lingkungan
	d. Perubahan nilai dan norma sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap masyarakat terhadap prostitusi - Penerimaan terhadap eks PSK - Perubahan moralitas kolektif

Dampak Politik	a. Dinamika kebijakan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peran pemerintah daerah dalam mengambil keputusan - Keterlibatan masyarakat dalam proses penutupan - Transparansi kebijakan
	b. Relasi antara pemerintah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah - Partisipasi warga dalam politik daerah - Respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan
	c. Stabilitas politik daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik politik kebijakan penutupan - Dukungan terhadap pemerintah daerah - Persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan daerah
	d. Transformasi kelembagaan politik daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Adaptasi lembaga daerah pasca penutupan

		<ul style="list-style-type: none"> - Peran lembaga sosial politik dalam mengakomodasi eks PSK - Kebijakan lanjutan pasca penutupan
--	--	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Creswell, penelitian adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan politik yang muncul akibat penutupan lokalisasi prostitusi Wandan di Desa Munjungagung Kabupaten Tegal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan masyarakat mengenai perubahan yang terjadi setelah kebijakan penutupan lokalisasi tersebut. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi sosial dan politik masyarakat pasca penutupan lokalisasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perubahan pola interaksi sosial, munculnya konflik sosial, serta respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dinamika politik yang muncul, termasuk relasi antara masyarakat dengan pemerintah serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dalam studi ini ditujukan pada warga terdampak pasca penutupan lokalisasi di Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini mengambil lokasi di Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat. Alasan mengambil lokasi tersebut karena Desa Munjungagung merupakan wilayah yang secara langsung terdampak oleh kebijakan penutupan lokalisasi prostitusi Wandan. Sebelum penutupan, Lokalisasi Wandan merupakan salah satu pusat aktivitas prostitusi yang memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, setelah dilakukan penutupan oleh pemerintah daerah, terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosial dan politik. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak kebijakan penutupan lokalisasi terhadap masyarakat setempat.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah menjadi sarana bagi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi. Subjek dalam penelitian kualitatif sampel dapat disebut sebagai narasumber, informan, dan partisipan. Peneliti menentukan subjek penelitian meliputi:

1. Dinas Sosial Kabupaten Tegal, yang berperan dalam penanganan permasalahan sosial pasca penutupan lokalisasi, termasuk pembinaan terhadap pihak-pihak yang terdampak seperti pekerja seks komersial maupun masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dan

sosial. Informan dari Dinas Sosial dianggap penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan rehabilitasi sosial, program pemberdayaan, serta evaluasi pemerintah terhadap dampak kebijakan penutupan lokalisasi.

2. Satpol PP Kabupaten Tegal, yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban serta pengawasan terhadap kebijakan penutupan lokalisasi. Informan dari Satpol PP dipilih karena memiliki informasi mengenai proses penutupan, bentuk penegakan aturan, strategi pengamanan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.
3. Tokoh masyarakat setempat, yang memahami dinamika sosial di lingkungan desa, termasuk perubahan norma sosial, potensi konflik, serta respon masyarakat terhadap kebijakan penutupan lokalisasi. Tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, membentuk opini publik, dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah.
4. Masyarakat sekitar lokalisasi Wandan, yang memiliki pengalaman nyata yang terjadi di lapangan, seperti perubahan pola interaksi sosial, perubahan kondisi ekonomi, munculnya konflik atau solidaritas sosial, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap pemerintah daerah. Informasi dari masyarakat sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berdampak terhadap kehidupan sehari-hari warga serta bagaimana masyarakat menilai keberhasilan maupun kekurangan kebijakan penutupan lokalisasi.

Melalui berbagai informan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih beragam dan mendalam mengenai dampak sosial dan politik yang ditimbulkan oleh kebijakan penutupan Lokalisasi Wandan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan yang dilakukan secara *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan mengenai penelitian ini. Kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball*. Dimana pemilihan informan lanjutan dalam rangka pengalihan data untuk mendapatkan variasi dan kedalaman informasi diperoleh atas dasar rujukan atau rekomendasi dari key informan yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Berikut adalah rician profil informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

Tabel 1.3 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pekerjaan Utama	Kategori Informan
1	Bambang	Staf Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Perwakilan dari Dinas Sosial
2	Eko Susdarwanto, S.H., M.H	Kepala Seksi Penindakan	Perwakilan dari Satpol PP
3	Kartono	Ketua RT	Tokoh Masyarakat
4	Kurniasih	Usaha warung makan	Pedagang
5	Sariah	Ibu rumah tangga	Masyarakat
6	Yuni	Ibu rumah tangga	Masyarakat

7	Darumi	Usaha warung makan	Pedagang
8	Sri	Ibu rumah tangga	Masyarakat
9	Ning	Usaha warung kopi	Pedagang
10	Ngadminiasih	Pengepul ikan	Pedagang

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

1.9.4 Sumber Data

Sumber data kualitatif dalam hal ini bersifat lebih memahami bagaimana fenomena atau gejala sosial yang ditemukan peneliti. Sumber data peneliti ini merupakan subyek darimana data itu diperoleh oleh peneliti (Idrus, 2009). Adapun jenis data yang akan dianalisis, yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan observasi yakni peneliti turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Hasil dari observasi ini berupa catatan atau rekaman yang dapat dijadikan data dalam pembahasan penelitian. Selain itu, data primer juga dapat dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan bersifat terbuka untuk memunculkan opini informan dengan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.

Data seperti ini dapat dijadikan sebagai data pelengkap dari data primer dan diharapkan mampu menjadi pendukung data yang sudah didapatkan melalui penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan perubahan sosial masyarakat terdampak penutupan Lokalisasi Wandan. Adapun data sekunder yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Satpol PP Kabupaten Tegal, arsip desa, berita media massa, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan penutupan lokalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang akan diteliti serta kondisi lingkungan masyarakat dalam penelitian kualitatif dilakukannya teknik pengumpulan data dengan menggunakan bermacam variasi data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan oleh penulis menggunakan 3 metode yakni melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dimana merupakan teknik yang paling tepat dalam proses penelitian.

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) menurut Sutopo (2006), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan data mentah yang selanjutnya diolah dan dianalisis demi mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan mampu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara mengamati langsung kondisi di lapangan untuk melihat kondisi perilaku serta kondisi lingkungan masyarakat. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur (Sugiyono, 2014). Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung dinamika kehidupan masyarakat, pola interaksi sosial, serta perubahan yang terjadi setelah penutupan lokalisasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan

penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yakni dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait. Data-data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara, merupakan data primer karena didapat langsung dari pihak pertama (Usman dan Akbar, 2009). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang nantinya akan dikumpulkan dan digunakan yaitu peraturan pemerintah, laporan kebijakan, serta dokumentasi lain yang relevan dengan penutupan Lokalisasi Wanda.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam sebuah penelitian melibatkan pengumpulan data yang terbuka berdasarkan pada pertanyaan umum kepada informan sehingga menghasilkan sebuah opini yang kemudian sebagai analisis data dalam penelitian. Pada hakekatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang akan dijawab. Salah satu bagian terpenting dalam menyusun laporan penelitian adalah analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman, dimana model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, data dan laporan lapangan yang telah di dapatkan selama proses penelitian untuk kemudian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok untuk difokuskan pada data yang terpenting kemudian dicari polanya melalui proses penyutingan, pemberian kode dan pentabelan. Pada tahap ini, reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data dipilih kemudian disederhanakan untuk kemudahan dalam penyajian serta menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang haru dilakukan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktifitas-aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan ini, kedua proses tersebut berlangsung selama proses penelitian dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga tidak terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah verifikasi dimana permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir dari penelitian sangat tergantung kepada informasi yang didapatkan dari beberapa informan kunci saat wawancara dilakukan.

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data sangat penting untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Data yang telah dikumpulkan juga harus diuji validitasnya untuk melihat apakah telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Penelitian ini menguji kredibilitas data dengan melalui triangulasi. Menurut Patton terdapat 4 (empat) jenis triangulasi untuk menguji data, antara lain:

1. Triangulasi sumber data

Sumber data yang digunakan meliputi arsip, dokumen, transkrip, wawancara, dan seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian.

2. Triangulasi pengamat

Merupakan pandangan pihak ketiga yaitu dosen sebagai pengamat atau expert judgement untuk memberikan masukan dan saran terhadap penelitian sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan.

3. Triangulasi teori

Teori yang digunakan untuk menguji data yang sudah dikumpulkan.

Teori-teori tersebut masih memiliki korelasi dengan penelitian.

4. Triangulasi metode

Peneliti menggunakan metode wawancara dan pengecekan dokumen untuk memperoleh kebenaran data sesuai dengan realita yang ada.

Penulis menggunakan keempat jenis triangulasi di atas untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian. Tahapan terakhir setelah melakukan triangulasi adalah menarik kesimpulan dan mengkonfirmasi hasil yang telah didapatkan. Tujuan dari ditetapkannya triangulasi adalah untuk memperoleh data yang tidak hanya berdasarkan dari satu sudut pandang saja, melainkan juga dari perspektif lain sehingga memperoleh kualitas data yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.